

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	REPUBLIKA	5	24-08-2002

Tajuk

Maling Tak Berhenti Mencuri

Setelah biru kini menjadi abu-abu. Setelah menangkap kini 'membebaskannya'. Tujuh kapal keruk ditangkap TNI AL karena diduga telah terjadi pelanggaran dalam 'bisnis' pasir laut pada 25 Juli dan 26 Juli. Kamis (22/8), Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri memutuskan untuk meneruskan penyidikan kasus ini hingga ke pengadilan.

Tim ini juga memutuskan untuk mengeluarkan barang bukti tujuh kapal tersebut dari penyitaan. Bahasa halus nya: pinjam-pakai plus denda. Pertanyaan bodohnya adalah mampukah TP4L mengawasi kapal-kapal berbendera asing tersebut agar tidak kabur dan lari ke perairan internasional?

Tentu saja keputusan tersebut mengundang sejumlah tanda tanya dan kecurigaan. Apalagi sebelumnya beredar rumor bahwa kasus ini akan selesai dengan memberikan hukuman denda semata. Rumor ini menjadi ramai diberitakan hampir semua media berpengaruh. Rumor ini dibumbui dengan isu suap dengan nilai jutaan dolar AS. Percaya pada rumor tentu tak baik, tapi mengabaikannya begitu saja juga bisa terperosok. Di negeri yang begitu kuat, menggila, dan meratanya korupsi, rumor seperti itu bukan hal aneh.

Sehari sebelum TP4L membuat keputusan, para pengusaha pasir laut dari Singapura menemui Rokhmin Dahuri. Memang, pasir laut itu diekspor ke Singapura. Negeri kecil tapi kaya raya ini sedang mereklamasi pantainya. Pasir untuk menimbun laut tersebut diambil dari Indonesia. Kini, daratan negeri pulau itu telah bertambah hampir 200 kilometer persegi. Ada dugaan, tak semuanya hasil dari bisnis sah. Bahkan diduga pengerukan pasir itu sebagian besar adalah ilegal alias mencuri dari Indonesia. Dampak lainnya adalah bertambahnya teritori negara Singapura, yang kemudian justru membuat pengurangan luas wilayah perairan Indonesia.

Karena itu pemerintah Indonesia kemudian melakukan pengawasan ketat terhadap bisnis ini. Selain meningkatkan posisi tawar sehingga mendongkrak harga, juga membuat zonasi. Bagi aktivis lingkungan, pasir laut adalah bempes suatu pulau. Jika pasir dikeruk secara sembarangan akan terjadi kerusakan ekosistem dan abrasi.

Kini, ketika upaya penegakan hukum sedang dilakukan, TP4L membuat kebijakan yang bersifat abu-abu. Jika barang bukti saja bisa dikeluarkan maka kecurigaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah mampu memberikan sanksi yang tegas kepada mereka. Apalagi pada tingkat awal, penyidikan hanya terarah pada pelanggaran UU Keimigrasian dan UU Kepabebean dan sama sekali tak menyentuh pidana pencurian atau pun penyelundupan yang memiliki tuntutan yang jauh lebih berat.

Kita berharap, pada tahap selanjutnya TP4L tidak mengubah abu-abu menjadi hitam. Harus diingat, maling belum berhenti mencuri. Pemerintah sudah selayaknya memiliki harga diri. Tak tunduk oleh lobi kaum maling. Apalagi dalam bisnis pasir laut ini terkandung soal keutuhan teritori. Tak heran jika sebuah media menyebut para pelaku pencuri pasir laut dijuluki sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Problem terbesar yang dihadapi bangsa ini sebenarnya kualitas integritas para pemimpinnya atau elitinya.

Hingga kini, TP4L tak pernah mengungkapkan para pengusaha yang menyewa tujuh kapal berbendera asing tersebut. Jika ingin mengubah abu-abu menjadi putih kembali, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengungkap siapa mereka sebenarnya. Apakah menyimpan nama mereka ke dalam laci juga ada ongkosnya? Memang ada tanda-tanda abu-abu itu menjadi hitam. Ingat, maling belum berhenti mencuri. ■